

Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Konteks Lokal di Kabupaten Seram Bagian Barat

Local Context-Based Education Policy Implementation Model in West Seram Regency

Natalis Lemosol*, Samson Laurens, Natanael Elake

Universitas Pattimura, Indonesia

* lemosolnatalis@gmail.com (Primary Contact)

ABSTRACT

This article develops a local context-based education policy implementation model for West Seram Regency, Maluku Province. The study applies a qualitative case-study approach supported by in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving education officials, school principals, teachers, supervisors, community leaders, customary actors, and parents. The findings show that education policy implementation in West Seram is shaped by four interrelated determinants: archipelagic geography, institutional capacity, socio-cultural resources, and human and financial resources. National education policies cannot be implemented effectively through a uniform model because schools in remote and island areas face limited transportation, electricity, internet connectivity, teacher distribution, and learning facilities. At the same time, local Maluku values such as *pela gandong*, *masohi*, and *sasi* provide cultural resources for strengthening character education, community participation, and culturally responsive pedagogy. Based on these findings, the article proposes the Local Context-Based Education Policy Implementation Model consisting of four integrated dimensions: policy adaptation, institutional strengthening, integration of local wisdom, and multi-actor collaboration. The model contributes to policy implementation studies by linking top-down policy standards with bottom-up contextual adaptation, particularly in archipelagic education governance.

Keywords

education policy; local context; policy implementation; West Seram; archipelagic region

Article History

Received: 2026-06-28

Accepted: 2026-07-09

Copyright © 2026, Lemosol et al
Published by MAN 4 Kota Pekanbaru
DOI: [10.56113/takuana.v5i2.593](https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.593)

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan manusia karena menentukan kualitas sumber daya manusia, mobilitas sosial, dan daya saing daerah. *Sustainable Development Goal* (SDG) 4 menegaskan pentingnya pendidikan inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat (United Nations, 2015). Namun, pencapaian tujuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan negara dan

pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan pendidikan ke dalam praktik yang sesuai dengan konteks sosial, geografis, budaya, dan kelembagaan setempat.

Indonesia sebagai negara kepulauan menghadapi tantangan implementasi kebijakan pendidikan yang kompleks. Kebijakan pendidikan nasional sering disusun dalam standar yang berlaku umum, tetapi penerapannya berlangsung pada daerah dengan kondisi yang sangat beragam. Pada wilayah perkotaan, tantangan utama dapat berupa kepadatan sekolah, mutu pembelajaran, dan kompetisi sumber daya. Sebaliknya, pada daerah kepulauan dan terpencil, tantangan yang lebih menonjol adalah akses transportasi, keterbatasan infrastruktur, distribusi guru, konektivitas digital, dan kesenjangan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan membutuhkan pendekatan yang mampu menjaga standar nasional sekaligus memberi ruang adaptasi terhadap kondisi lokal.

Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan. Namun, kewenangan tersebut tidak selalu berjalan seimbang dengan kapasitas institusional, dukungan anggaran, dan kesiapan sumber daya manusia. Kristiansen dan Pratikno (2006) menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan di Indonesia menghasilkan dampak yang beragam karena transparansi, akuntabilitas, pembiayaan keluarga, serta disparitas sosial dan geografis masih menjadi persoalan penting. Muhdi (2019) juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di era otonomi daerah sangat dipengaruhi kemampuan translasi kebijakan, kapasitas manajemen sumber daya manusia, jumlah pelaksana, dan akuntabilitas.

Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah kepulauan yang menghadapi tantangan khas dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk pendidikan. Karakter kepulauan menuntut tata kelola pendidikan yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan daerah daratan yang memiliki konektivitas lebih baik. Madubun et al. (2024) menekankan pentingnya tata kelola berbasis geografi dalam layanan publik di wilayah kepulauan karena hambatan jarak, biaya, cuaca, dan akses fisik dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Dalam bidang pendidikan, kondisi tersebut berdampak pada kehadiran guru, distribusi fasilitas, supervisi sekolah, dan pelaksanaan program pembelajaran. Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi lokus penting untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan berbasis konteks lokal. Kabupaten ini memiliki karakter geografis yang memadukan wilayah daratan, pesisir, dan kepulauan, serta memiliki keragaman sosial-budaya yang kuat. Sekolah-sekolah di wilayah yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan umumnya memiliki akses yang relatif lebih baik terhadap layanan pendidikan, sedangkan sekolah di daerah terpencil menghadapi hambatan transportasi, keterbatasan listrik, koneksi internet, dan distribusi guru. Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional yang bersifat seragam perlu ditranslasikan secara kontekstual agar tidak menciptakan kesenjangan implementasi antarwilayah.

Secara teoretis, implementasi kebijakan dapat dipahami melalui pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menekankan pentingnya tujuan kebijakan, standar, struktur komando, dan kontrol pelaksanaan. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* menekankan praktik pelaksana di lapangan, jaringan aktor, konteks lokal, dan ruang adaptasi dalam implementasi. Sabatier (1986) menyarankan pentingnya sintesis kedua pendekatan tersebut karena implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh rancangan formal, tetapi juga oleh kondisi implementor, kelompok sasaran, dan lingkungan sosial-politik. Dalam konteks pendidikan, pendekatan implementasi berbasis konteks lokal

juga berkaitan dengan pedagogi responsif budaya. Ladson-Billings (1994) menjelaskan bahwa pembelajaran yang efektif perlu membangun hubungan dengan latar budaya, sejarah, dan pengalaman peserta didik. Kong (2021) menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran yang responsif terhadap budaya dapat meningkatkan keterlibatan siswa, terutama pada sekolah pedesaan dan komunitas yang memiliki keterbatasan akses. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan administrasi sekolah, tetapi juga dengan bagaimana kurikulum, pembelajaran, dan manajemen sekolah mengakui pengetahuan lokal sebagai sumber pendidikan.

Kearifan lokal masyarakat Maluku, seperti *pela gandong*, *masohi*, dan *sasi*, memiliki potensi penting dalam membangun pendidikan yang kontekstual. *Pela gandong* menekankan relasi persaudaraan dan kohesi sosial, *masohi* menekankan kerja bersama, sedangkan *sasi* mengandung prinsip pengelolaan sumber daya dan disiplin kolektif. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi basis pendidikan karakter, pendidikan lingkungan, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah. Integrasi nilai lokal ke dalam pendidikan juga sejalan dengan argumen Manns et al. (2025) bahwa pengetahuan lokal dan perspektif masyarakat adat dapat memperkuat pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mengembangkan model implementasi kebijakan pendidikan berbasis konteks lokal di Kabupaten Seram Bagian Barat. Kebaruan artikel terletak pada sintesis antara teori implementasi kebijakan, tata kelola pendidikan daerah kepulauan, dan pedagogi responsif budaya. Artikel ini tidak hanya mengidentifikasi hambatan implementasi kebijakan pendidikan, tetapi juga merumuskan model yang menempatkan adaptasi kebijakan, penguatan kelembagaan, integrasi kearifan lokal, dan kolaborasi multi-aktor sebagai empat dimensi utama implementasi pendidikan di wilayah kepulauan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami implementasi kebijakan pendidikan sebagai proses sosial dan kelembagaan yang berlangsung dalam konteks lokal yang kompleks. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan pendidikan nasional diterjemahkan, diadaptasi, dan dijalankan di Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai daerah dengan karakteristik kepulauan dan sosial-budaya yang khas. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena wilayah ini merepresentasikan daerah kepulauan Indonesia timur yang menghadapi tantangan pendidikan berupa keterbatasan akses geografis, ketimpangan fasilitas, distribusi guru yang tidak merata, dan keragaman budaya lokal. Selain itu, Kabupaten Seram Bagian Barat memiliki nilai-nilai lokal Maluku yang berpotensi diintegrasikan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti *pela gandong*, *masohi*, dan *sasi*.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan aktor yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan pendidikan. Informan meliputi pejabat Dinas Pendidikan, kepala sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, guru, pengawas sekolah, tokoh masyarakat, pemangku adat, dan orang tua siswa. Pemilihan informan didasarkan pada pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Data dikumpulkan melalui

wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pandangan informan mengenai kebijakan pendidikan nasional, proses adaptasi di daerah, hambatan implementasi, peran sekolah, partisipasi masyarakat, serta integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran. Observasi dilakukan pada kegiatan sekolah, proses pembelajaran, interaksi sekolah dengan masyarakat, serta praktik manajemen pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen kebijakan, rencana strategis, rencana kerja sekolah, laporan evaluasi program, dan dokumen pendukung lain yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi, data dari wawancara, observasi, dan dokumen dipilih, dikodekan, dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Pada tahap penyajian, data disusun dalam bentuk narasi tematik dan tabel analitis agar hubungan antar kategori dapat dibaca secara sistematis. Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti mengidentifikasi pola, tema utama, dan proposisi model implementasi kebijakan pendidikan berbasis konteks lokal. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan konfirmasi terbatas kepada informan kunci. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemerintah daerah, sekolah, guru, masyarakat, dan orang tua. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Konfirmasi kepada informan kunci digunakan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti tidak menyimpang dari pengalaman lapangan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian berfokus pada satu kabupaten sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara langsung ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kedua, model yang dikembangkan bersifat konseptual-empiris berdasarkan temuan lapangan dan memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks daerah lain. Ketiga, penelitian ini belum mengukur dampak kuantitatif model terhadap capaian belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas model secara komparatif dan longitudinal.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat berlangsung dalam medan kebijakan yang kompleks. Kebijakan nasional menyediakan standar, arah, dan target yang relatif jelas, tetapi pelaksanaannya memerlukan penyesuaian karena kondisi geografis, kapasitas kelembagaan, keragaman sosial-budaya, dan keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, masalah utama bukan terletak pada ada atau tidaknya kebijakan, melainkan pada kemampuan daerah menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam strategi implementasi yang realistis.

Sekolah di wilayah yang lebih mudah dijangkau cenderung memiliki akses lebih baik terhadap sarana pembelajaran, guru, pengawasan, dan konektivitas digital. Sebaliknya, sekolah di wilayah terpencil menghadapi hambatan transportasi, listrik, internet, dan ketersediaan guru. Perbedaan ini membuat implementasi kebijakan yang sama dapat menghasilkan capaian yang berbeda. Misalnya, kebijakan pembelajaran berbasis teknologi atau penguatan platform digital sulit diterapkan secara seragam ketika sebagian sekolah belum memiliki listrik stabil dan jaringan internet memadai.

Temuan tersebut menegaskan pentingnya translasi kebijakan. Translasi kebijakan bukan hanya kegiatan administratif untuk menurunkan kebijakan pusat ke daerah, tetapi proses analitis untuk menyesuaikan instrumen, target, jadwal, dan strategi pelaksanaan dengan kondisi lokal. Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Barat, translasi kebijakan harus mempertimbangkan jarak, cuaca, biaya transportasi, distribusi guru, karakter masyarakat, dan potensi kearifan lokal sebagai sumber dukungan pendidikan.

3.2. Determinan implementasi kebijakan pendidikan

Berdasarkan analisis data, terdapat empat determinan utama yang memengaruhi implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu faktor geografis, kelembagaan, sosial-budaya, dan sumber daya. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi. Hambatan geografis dapat memperlemah supervisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya dapat mengurangi efektivitas program, sementara dukungan sosial-budaya dapat menjadi modal untuk menutup sebagian keterbatasan formal.

Tabel 1. Determinan implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat

Determinan	Temuan utama	Implikasi implementasi
Geografis	Sebagian sekolah berada pada wilayah dengan akses transportasi, listrik, dan internet terbatas.	Kebijakan perlu disesuaikan dengan karakter kepulauan, jarak, cuaca, dan biaya logistik.
Kelembagaan	Kapasitas manajerial dan teknis aparatur serta satuan pendidikan belum merata.	Diperlukan penguatan kapasitas, sistem monitoring adaptif, dan kepemimpinan sekolah yang responsif.
Sosial-budaya	Nilai <i>pela gandong</i> , masohi, dan sasi menjadi modal sosial bagi pendidikan.	Kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam kurikulum, pendidikan karakter, dan partisipasi masyarakat.
Sumber daya	Distribusi guru, fasilitas pembelajaran, dan anggaran operasional masih belum merata.	Perlu skema afirmasi untuk sekolah terpencil, insentif guru, dan perencanaan berbasis kebutuhan wilayah.

Sumber: Olahan penulis berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Tabel 1 menunjukkan bahwa faktor geografis menjadi determinan dasar yang memengaruhi determinan lainnya. Jarak antar lokasi, kondisi laut, keterbatasan transportasi, dan cuaca membuat distribusi layanan pendidikan tidak selalu dapat berjalan sesuai jadwal formal. Hal ini berpengaruh terhadap pengiriman sarana, pelaksanaan supervisi, kehadiran guru, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan. Meyer et al. (2024) menunjukkan bahwa isolasi geografis di wilayah kepulauan berkorelasi dengan keterbatasan infrastruktur, terutama konektivitas internet dan akses terhadap sumber daya digital. Faktor kelembagaan berkaitan dengan kemampuan Dinas Pendidikan dan sekolah dalam mengelola program. Struktur organisasi dapat tersedia, tetapi implementasi membutuhkan kemampuan teknis, koordinasi lintas aktor, dan monitoring yang berkelanjutan. Kuenzi (2022) menegaskan bahwa kualitas institusional berpengaruh terhadap kualitas pendidikan karena efektivitas pemerintah menentukan bagaimana belanja publik, rekrutmen, dan kualitas layanan pendidikan dapat berjalan. Dalam konteks Seram Bagian Barat, penguatan kelembagaan perlu diarahkan pada kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi program yang operasional dan sesuai wilayah.

Faktor sosial-budaya memperlihatkan sisi potensial dari konteks lokal. Nilai *pela gandong*, masohi, dan sasi tidak hanya menjadi identitas budaya, tetapi dapat menjadi sumber pendidikan karakter, penguatan solidaritas, dan pembelajaran lingkungan. Nilai masohi, misalnya, dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memperbaiki fasilitas sekolah atau mendukung kegiatan pendidikan. Nilai sasi dapat dikaitkan dengan pendidikan lingkungan, konservasi, dan tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, konteks lokal bukan hambatan semata, tetapi juga sumber daya pendidikan. Faktor sumber daya berkaitan dengan distribusi guru, fasilitas, anggaran, dan bahan ajar. Sekolah yang jauh dari pusat kabupaten umumnya menghadapi persoalan lebih berat dalam memperoleh guru yang stabil dan fasilitas yang memadai. Turwelis et al. (2025) menemukan bahwa guru di daerah rural cenderung mendukung reformasi pendidikan, tetapi menghadapi keterbatasan sumber daya dan arahan kebijakan yang belum cukup jelas. Kondisi serupa tampak dalam penelitian ini, ketika semangat guru untuk beradaptasi belum selalu diikuti dukungan pelatihan, perangkat ajar, dan infrastruktur.

3.3. Model implementasi kebijakan pendidikan berbasis konteks lokal

Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini merumuskan Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Konteks Lokal. Model ini disusun untuk menjembatani standar kebijakan nasional dengan kebutuhan adaptasi lokal. Model tersebut terdiri dari empat dimensi yang saling berhubungan, yaitu adaptasi kebijakan, penguatan kelembagaan, integrasi kearifan lokal, dan kolaborasi multi-aktor.

Tabel 2. Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Konteks Lokal

Dimensi model	Fokus utama	Strategi operasional
Adaptasi kebijakan	Translasi kebijakan nasional agar sesuai kondisi kepulauan.	Analisis konteks wilayah, pemetaan kesenjangan kebijakan, fleksibilitas kalender, dan penyesuaian standar layanan.
Penguatan kelembagaan	Peningkatan kapasitas Dinas Pendidikan dan sekolah.	Pelatihan aparatur, mentoring kepala sekolah, komunitas praktisi guru, dan monitoring adaptif.
Integrasi kearifan lokal	Penguatan relevansi budaya dalam pendidikan.	Muatan lokal, pedagogi berbasis tempat, pelibatan tokoh adat, dan pembelajaran berbasis lingkungan.
Kolaborasi multi-aktor	Sinergi pemerintah, sekolah, masyarakat, adat, dunia usaha, dan perguruan tinggi.	Forum koordinasi pendidikan daerah, mobilisasi sumber daya, kemitraan program, dan evaluasi partisipatif.

Sumber: Rumusan penulis berdasarkan sintesis temuan penelitian dan kajian teori implementasi kebijakan.

Dimensi adaptasi kebijakan menempatkan pemerintah daerah sebagai penerjemah aktif kebijakan nasional. Dalam model ini, kebijakan pusat tetap menjadi rujukan normatif, tetapi strategi pelaksanaannya disesuaikan dengan karakter wilayah. Penyesuaian dapat dilakukan melalui peraturan bupati, pedoman teknis daerah, atau skema afirmasi untuk sekolah terpencil. Misalnya, sekolah yang tidak memiliki internet stabil tidak dapat dipaksa menjalankan pembelajaran digital dengan indikator yang sama seperti sekolah di pusat kota. Yang dibutuhkan adalah alternatif pembelajaran yang tetap memenuhi tujuan kurikulum, tetapi realistis terhadap infrastruktur lokal. Dimensi penguatan kelembagaan

menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan, tetapi oleh kapasitas institusi pelaksana. Aparatur pendidikan perlu memiliki kemampuan analisis wilayah, manajemen program, penganggaran berbasis kebutuhan, serta evaluasi berbasis data. Di tingkat sekolah, kepala sekolah menjadi aktor penting karena mereka menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik manajemen, pembelajaran, dan hubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kepemimpinan sekolah menjadi bagian utama model.

Dimensi integrasi kearifan lokal menjadi karakter khas model ini. Kearifan lokal tidak ditempatkan sebagai ornamen budaya, tetapi sebagai sumber pembelajaran dan penguatan tata kelola pendidikan. *Pela gandong* dapat digunakan untuk memperkuat pendidikan toleransi dan persaudaraan; *masohi* dapat menjadi dasar partisipasi komunitas; sedangkan *sasi* dapat menjadi materi pendidikan lingkungan dan disiplin sosial. Pendekatan ini sesuai dengan gagasan pedagogi responsif budaya yang menempatkan pengalaman dan identitas siswa sebagai dasar pembelajaran (Ladson-Billings, 1994). Dimensi kolaborasi multi-aktor menegaskan bahwa pendidikan tidak dapat dikelola hanya oleh Dinas Pendidikan dan sekolah. Pemerintah daerah, masyarakat adat, orang tua, dunia usaha, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat perlu menjadi bagian dari ekosistem implementasi. Kolaborasi tersebut dapat difasilitasi melalui forum koordinasi pendidikan daerah yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi memiliki fungsi perencanaan, pemantauan, mobilisasi sumber daya, dan penyelesaian masalah.

3.4. Sintesis teoretis dan implikasi praktis

Model yang dikembangkan dalam artikel ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di daerah kepulauan memerlukan sintesis antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* tetap diperlukan agar standar pendidikan nasional, hak peserta didik, dan arah pembangunan pendidikan tetap terjaga. Namun, pendekatan *bottom-up* diperlukan agar sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah dapat menyesuaikan strategi dengan realitas lokal. Tanpa sintesis tersebut, kebijakan nasional berisiko menjadi terlalu administratif dan tidak responsif terhadap hambatan lapangan.

Secara teoretis, artikel ini memperluas penggunaan konsep pedagogi responsif budaya dari level pembelajaran menuju level implementasi kebijakan. Selama ini, responsivitas budaya lebih sering dibahas sebagai strategi guru di kelas. Artikel ini menunjukkan bahwa responsivitas budaya juga perlu hadir dalam perencanaan kebijakan, penganggaran, supervisi, kurikulum muatan lokal, dan kemitraan masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan berbasis konteks lokal dapat dipahami sebagai *culturally responsive policy implementation*. Secara praktis, model ini mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan sekolah berbasis wilayah. Pemetaan tersebut perlu mencakup akses transportasi, ketersediaan listrik, internet, jumlah guru, kondisi sarana, karakter komunitas, dan potensi kearifan lokal. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan prioritas program. Sekolah yang menghadapi hambatan paling berat perlu memperoleh dukungan afirmatif, bukan diperlakukan sama dengan sekolah yang memiliki akses lebih baik.

Implikasi lainnya adalah perlunya penguatan sistem kolaborasi. Pemerintah daerah dapat membentuk forum koordinasi pendidikan yang melibatkan sekolah, tokoh adat, orang tua, akademisi, dan sektor swasta. Forum ini dapat menjadi ruang untuk

merumuskan muatan lokal, mendukung penyediaan fasilitas, memantau kehadiran guru, mengembangkan program literasi, dan mengatasi masalah anak putus sekolah. Dengan mekanisme tersebut, pendidikan menjadi agenda bersama, bukan hanya tanggung jawab formal pemerintah.

Tabel 3. Implikasi operasional model bagi pemangku kepentingan pendidikan

Pemangku kepentingan	Peran strategis	Bentuk aksi yang disarankan
Pemerintah daerah	Menjamin arah kebijakan dan dukungan sumber daya.	Regulasi pendidikan berbasis konteks lokal, afirmasi sekolah terpencil, dan penganggaran berbasis wilayah.
Dinas Pendidikan	Mengelola translasi kebijakan dan pembinaan teknis.	Pemetaan sekolah, pelatihan guru, supervisi adaptif, dan monitoring berbasis data.
Satuan pendidikan	Melaksanakan kebijakan dalam praktik pembelajaran dan manajemen sekolah.	Pedagogi berbasis konteks, kepemimpinan sekolah, pelibatan komite, dan penguatan budaya sekolah.
Masyarakat dan adat	Mendukung legitimasi sosial dan transfer nilai lokal.	Pelibatan tokoh adat, masohi pendidikan, narasumber lokal, dan pengawasan komunitas.
Perguruan tinggi dan mitra	Memberi dukungan pengetahuan, riset, dan pendampingan.	Riset tindakan, pendampingan kurikulum lokal, pelatihan, dan evaluasi program.

Sumber: Rumusan penulis berdasarkan hasil penelitian.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa keberhasilan model bergantung pada pembagian peran yang jelas. Pemerintah daerah berperan menyediakan regulasi dan sumber daya; Dinas Pendidikan mengelola translasi kebijakan; sekolah menerapkan strategi pada tingkat pembelajaran; masyarakat dan adat memperkuat legitimasi sosial; sedangkan perguruan tinggi serta mitra eksternal mendukung riset dan pendampingan. Pembagian peran ini penting agar implementasi tidak terjebak pada ego sektoral dan program yang berjalan sendiri-sendiri. Dengan demikian, kontribusi konseptual artikel ini terletak pada penegasan bahwa konteks lokal bukan sekadar latar penelitian, melainkan variabel substantif dalam implementasi kebijakan pendidikan. Geografi kepulauan, kapasitas kelembagaan, nilai sosial-budaya, dan ketersediaan sumber daya membentuk cara kebijakan diterjemahkan dan diterima. Oleh karena itu, model implementasi yang efektif harus bersifat adaptif, partisipatif, dan responsif budaya.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dapat dijalankan secara seragam sebagaimana daerah dengan karakter daratan dan akses infrastruktur yang lebih stabil. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat determinan utama, yaitu faktor geografis, kelembagaan, sosial-budaya, dan sumber daya. Karakter kepulauan membuat akses transportasi, listrik, internet, distribusi guru, dan supervisi sekolah menjadi tantangan penting yang harus diperhitungkan dalam kebijakan pendidikan daerah. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kearifan lokal masyarakat Maluku memiliki potensi besar untuk memperkuat pendidikan. Nilai *pela gandong*, *masohi*, dan *sasi* dapat diintegrasikan dalam pendidikan karakter, pembelajaran berbasis lingkungan, partisipasi masyarakat, serta penguatan identitas budaya peserta didik. Dengan demikian,

kearifan lokal tidak boleh diperlakukan sebagai unsur tambahan, tetapi sebagai sumber daya pendidikan yang relevan untuk membangun pembelajaran yang bermakna dan responsif budaya.

Kontribusi utama artikel ini adalah perumusan Model Implementasi Kebijakan Pendidikan Berbasis Konteks Lokal yang terdiri atas empat dimensi: adaptasi kebijakan, penguatan kelembagaan, integrasi kearifan lokal, dan kolaborasi multi-aktor. Model ini menawarkan sintesis antara pendekatan top-down dan bottom-up dalam implementasi kebijakan pendidikan. Standar nasional tetap menjadi rujukan, tetapi strategi pelaksanaan harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, kapasitas kelembagaan, dan kekuatan sosial-budaya lokal. Secara praktis, pemerintah daerah perlu menyusun regulasi dan pedoman teknis yang memberi ruang bagi adaptasi kebijakan pendidikan di daerah kepulauan. Dinas Pendidikan perlu memperkuat pemetaan sekolah berbasis wilayah, pelatihan guru, supervisi adaptif, dan sistem monitoring berbasis data. Sekolah perlu mengembangkan pedagogi berbasis konteks dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Sementara itu, komunitas adat, orang tua, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan perlu dilibatkan secara lebih sistematis dalam ekosistem pendidikan daerah.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang masih berada pada satu kabupaten dan belum menguji efektivitas model secara kuantitatif terhadap hasil belajar siswa. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif antarwilayah kepulauan, pengujian model pada beberapa sekolah, serta kajian longitudinal mengenai dampak integrasi kearifan lokal terhadap mutu pembelajaran, partisipasi masyarakat, dan pemerataan layanan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kong, S. (2021). Culturally responsive teaching in rural schools in China. *Frontiers in Psychology*. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.990363>
- Kristiansen, S., & Pratikno. (2006). Decentralising education in Indonesia. *International Journal of Educational Development*, 26(5), 513–531. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2005.12.003>
- Kuenzi, J. J. (2022). Institutional quality and education quality in developing countries: Effects and transmission channels. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-00869-9>
- Ladson-Billings, G. (1994). *The dreamkeepers: Successful teachers of African American children*. Jossey-Bass.
- Madubun, J., Akib, H., Jasruddin, & Tangkilisan, Y. B. (2024). Public services in island subdistricts: Towards geography-based governance. *Australian Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12586>
- Manns, M., Heiss, J., Morohashi, J., & Loupis, L. (2025). Harnessing indigenous knowledge for education for sustainable development. *SAGE Open*. <https://doi.org/10.1177/09734082251360875>
- Masino, S., & Niño-Zarazúa, M. (2016). What works to improve the quality of student learning in developing countries? *International Journal of Educational Development*, 48, 53–65. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2015.11.012>

- Meyer, F., Tiwery, Y., Kamanasa, L. S., Tiwery, D. S., Ferdinandus, M. S., & Lekawael, R. F. J. (2024). Strengthening digital learning for archipelago teachers in Letti Island. *JERKIN: Journal of English Education and Research*.
- Muhdi, M. (2019). Framework for implementation of education policy in the perspective of education management in Indonesia. *Universal Journal of Educational Research*, 7(12), 2717–2728. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.071220>
- Nurhayati, N., Ahmad, A., & Rosyid, M. (2025). Implementing school vision and mission in archipelago regions: Challenges and opportunities in Riau Islands. *International Journal of Studies in International Education*, 2(2).
- Sabatier, P. A. (1986). Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48. <https://doi.org/10.1017/S0143814X00003846>
- Turwelis, T., Rahayu, S., & Suryadi, A. (2025). Urban and rural teacher perspectives on Indonesian educational reform: Challenges and policy implications. *Cogent Education*. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2497142>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.